



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI



Oleh :

Sapon Suryopurnomo, M.Si



PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MATEMATIKA

Jl. Kaliurang Km. 6, Sambisari, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta
Kotak Pos 31 YKBS YOGYAKARTA 55281

Telp. (0274) 885752, 881717, 885725, Faks. (0274) 885752

Website: www.p4tkmatematika.com, E-mail: p4tkmatematika@yahoo.com



SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH

A. PENDAHULUAN

Tingkat korupsi di Indonesia sudah begitu kronis. Data tahun 2006 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi terburuk dengan dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2,4. Skala IPK mulai dari 1 sampai 10, semakin besar nilai IPK suatu negara maka semakin bersih negara tersebut dari tindakan korupsi. Dari data yang diperoleh dari Transparency International Corruption Perception Index 2006 tersebut, IPK Indonesia sama dengan negara miskin lainnya seperti Ethiopia, Togo, Zimbabwe, Burundi, Azerbaijan, Papua New Guinea dan Central African Republic. Angka ini menyimpulkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara miskin dengan angka korupsi yang sangat tinggi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi berarti busuk; palsu; suap. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menyebabkan sebuah negara menjadi bangkrut dengan efek yang luar biasa seperti hancurnya perekonomian, rusaknya sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Korupsi di Indonesia sudah membudaya tanpa proses peradilan yang terbuka dan kredibel. Semua pihak yang terkait dengan sebuah kasus korupsi seakan menutup mata dan lepas tangan seolah-olah tanpa terjadi apa-apa. Tindakan korupsi mulai dari yang paling besar oleh para pejabat negeri ini sampai kepada yang paling kecil seperti pada kepala desa, kepala sekolah dan pegawai rendahan. mulai dari proses penyusunan berjumlah puluhan ribu rupiah yang biasa terlihat di jalanan sampai pada kasus menggelapkan uang negara dengan jumlah triliunan.

Pengertian korupsi dapat menjadi lebih luas lagi. Perbuatan seperti berbohong, menyontek di sekolah, mark up, memberi hadiah sebagai pelicin dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tindakan korupsi merupakan sekumpulan kegiatan yang menyimpang dan dapat merugikan orang lain. Kasus-kasus korupsi seperti ini sangat banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan cenderung sudah membudaya. Jika diperhatikan, hampir disemua aspek kehidupan bangsa ini terlibat korupsi. Dari lembaga pendidikan sampai lembaga keagamaan

sekalipun. Di lingkungan sekolah sangat banyak ditemui praktek-praktek korupsi, mulai dari yang paling sederhana seperti mencontek, berbohong, melanggar aturan sekolah, terlambat datang sampai pada menggelapkan uang sekolah pembangunan sekolah yang bernilai puluhan juta rupiah.

Pada saat ini, ada indikasi terjadinya sikap apatis masyarakat terhadap tindakan korupsi. Masyarakat seakan telah jenuh dan terbiasa dengan kasus-kasus korupsi yang mencuat kepermukaan. Tidak ada sanksi moral dari masyarakat terhadap para koruptor. Bahkan, secara tak langsung budaya korupsi telah merajalela ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada setiap aspek kehidupan, selalu ditemui budaya korupsi yang telah mengakar dan menjadi kebiasaan lumrah setiap orang.

Masyarakat harus sadar bahwa uang yang dikorupsi oleh para koruptor merupakan uang rakyat. Uang rakyat tersebut seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, membiayai pendidikan, kesehatan, membuka lapangan pekerjaan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, air dan lain-lain. Masyarakat harus mengetahui besarnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi tersebut, pendidikan menjadi mahal, begitu juga dengan pelayanan kesehatan, transportasi menjadi tidak aman, rusaknya infrastruktur dan yang paling berbahaya adalah meningkatnya angka pengangguran sehingga berkolerasi kepada angka kriminalitas.

Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Desember tahun 2002 merupakan sebuah itikad baik dari pemerintahan saat itu. KPK menjadi harapan baru bagi Indonesia untuk mengobati penyakit bangsa yang sudah kronis. Namun, banyak pihak yang menyangsikan KPK akan mampu memberantas korupsi. Pada awal pendiriannya, banyak pihak yang meragukan sepak terjang KPK. Hal ini cukup beralasan, karena KPK sebagai sebuah lembaga independen beranggotakan orang-orang yang ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR. Banyak kalangan yang beranggapan bahwa KPK akan tebang pilih dalam menjalankan tugasnya sebagai pengadil para koruptor. Terlepas dari itu, KPK tetap menjadi tumpuan harapan bagi bangsa ini untuk membongkar kasus korupsi dan memenjarakan para koruptor yang terlibat.

Sampai saat ini KPK sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa. KPK membuat gebrakan dengan menjadikan beberapa gubernur sebagai tersangka. Disamping itu, KPK juga telah menjadikan beberapa Bupati sebagai tersangka kasus korupsi. Ditambah lagi dengan suksesnya KPK menggiring anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Mulyana Kusumah ke dalam penjara sebagai tersangka kasus suap melalui penyadapan telepon.

Mengingat begitu beratnya tugas KPK dan besarnya akibat yang disebabkan oleh kasus korupsi tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak mengikis karang korupsi yang telah menggurita. Cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan. Diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis siswa. Pola pendidikan yang sistematis akan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Gerakan bersama anti korupsi ini akan memberikan tekanan bagi penegak hukum dan dukungan moral bagi KPK sehingga lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

Dengan adanya pendidikan anti korupsi ini, diharapkan akan lahir generasi tanpa korupsi sehingga dimasa yang akan datang akan tercipta Indonesia yang bebas dari korupsi. Harapan awal tentunya ini akan berdampak langsung pada lingkungan sekolah yaitu pada semua elemen pendidikan, seperti kepala sekolah, guru, karyawan dan siswa. Lingkungan sekolah akan menjadi pionier bagi pemberantasan korupsi dan akan merembes ke semua aspek kehidupan bangsa demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

B. KONSEPSI SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

UU No. 20 thn. 2003 pasal 1 ayat 3 mengemukakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Selanjutnya, istilah manajemen pendidikan acapkali disandingkan dengan istilah administrasi sekolah. Berkaitan dengan itu, terdapat tiga pandangan berbeda: pertama, mengartikan administrasi lebih luas dari pada manajemen (manajemen merupakan inti dari administrasi); kedua, melihat manajemen lebih luas dari pada administrasi (administrasi merupakan inti dari manajemen); dan ketiga yang menganggap bahwa manajemen identik dengan administrasi.

Dalam makalah ini, istilah manajemen diartikan sama dengan istilah administrasi atau pengelolaan, yaitu segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal. Hal ini sesuai dengan

Berdasarkan fungsi pokoknya, manajemen mempunyai fungsi yaitu:

1. merencanakan (planning),
2. mengorganisasikan (organizing),
3. mengarahkan (directing),
4. mengkoordinasikan (coordinating),
5. mengawasi (controlling), dan
6. mengevaluasi (evaluation).

Selanjutnya, sistem manajemen pendidikan tersebut mensinergiskan terkaitnya komponen-komponen pendidikan yang meliputi 1. kesiswaan, 2. kurikulum, 3. tenaga kependidikan, 4. sarana-prasarana, 5. dana, 6. lingkungan (hubungan sekolah dengan masyarakat), dan 7. kegiatan belajar-mengajar, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Secara diagramatis digambarkan seperti di bawah ini.



Gambar 1
Berbagai Komponen Pendidikan Yang Perlu Dikelola

Komponen-komponen tersebut merupakan sub-sistem dalam sistem pendidikan (sistem pembelajaran). Bila terdapat perubahan pada salah satu sub-sistem (komponen), maka menuntut perubahan/ penyesuaian komponen lainnya. Dalam hal ini, bila dalam suatu kelas terdapat perubahan pada siswa, maka menuntut penyesuaian (modifikasi) pengelolaan kesiswaan, kurikulum (program pengajaran), tenaga kependidikan, sarana-prasarana, dana, lingkungan, serta kegiatan belajar-mengajar.

Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan berdasarkan UU No. 20 th. 2003 pada BAB III pasal 4 mengharuskan pendidikan berdasarkan pada prinsip:

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan nilai kultural. Kondisi tersebut adalah bahan dasar untuk menumbuhkan penolakan terhadap PENYAKIT KORUPSI. Disamping itu pendidikan yang dilakukan adalah merupakan suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan. Kondisi tersebut tentunya secara sistemik dan sistematis PENOLAKAN TERHADAP KORUPSI menjadi kultur yang terinternalisasi. Pada akhirnya peserta didik memiliki jiwa anti korupsi yang dikuatkan dengan keteladanan yang dibangun dalam sistem pendidikan kita.

C. PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH

1. Manajemen Kesiswaan

Manajemen Kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam kaitannya dengan pendidikan anti korupsi maka manajemen kesiswaan lebih difokuskan pada (1) pengembangan budaya mutu (2) Program Bimbingan dan Penyuluhan dan (2) Program peningkatan belajar siswa. Dalam program budaya mutu dimulai dari pembuatan kesepakatan mutu oleh siswa dapat berisikan tata tertib, aturan dalam pembelajaran, dan tindakan bagi yang melanggar peraturan, dll. Selanjutnya program BP ditekankan pada perlunya penanaman nilai-nilai ketaatan dan kejujuran pada peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian untuk program peningkatan belajar siswa lebih diarahkan pada pengembangan bahan ajar seluruh mata pelajaran dikaitkan dengan menumbuhkan-kembangkan budaya anti korupsi.

2. Manajemen Kurikulum

Kurikulum mencakup kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. Kurikulum nasional merupakan standar nasional yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan kurikulum muatan lokal merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan, yang disusun oleh Dinas Pendidikan Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Manajemen Kurikulum terkait dengan pendidikan anti dilakukan dengan cara: (1) Modifikasi isi/materi, (2) Modifikasi proses belajar-mengajar, (3) Modifikasi lingkungan belajar, dan (4) Modifikasi pengelolaan kelas.

Masuknya pendidikan anti korupsi dalam sistem pembelajaran tidaklah harus dengan menambah mata pelajaran khusus tentang “PENDIDIKAN ANTI KORUPSI” tetapi lebih ditekankan pada internalisasi budaya anti korupsi melalui penyampaian materi ajar. Untuk kepentingan tersebut maka dibutuhkan modifikasi bahan ajar, proses pembelajaran, dan lingkungan belajar yang diarahkan pada penanaman budaya tersebut.

Sebagai contoh untuk mata pelajaran matematika adalah:

- Materi Jarak, Waktu dan Kecepatan untuk menanamkan sikap bertanggung jawab dan menepati janji
- Materi Perbandingan berat dan harga untuk menanamkan sikap kejujuran
- Materi Penyusunan Jaring-jaring Kubus untuk menanamkan sikap menghargai orang lain

3. Manajemen Tenaga Pendidikan dan Kependidikan

Tenaga pendidik dan kependidikan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.

Tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah meliputi Tenaga Pendidik (Guru), Pengelola Satuan Pendidikan, Pustakawan, Laboran, dan Teknisi sumber

belajar. Guru yang terlibat di sekolah inklusi yaitu Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan Guru Pembimbing Khusus.

Manajemen tenaga kependidikan terkait dengan anti korupsi antara lain meliputi: (1) Kedisiplinan pegawai; (2) Ketaatan pegawai; (3) Memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai model atau tauladan; dan (4) Mengatur pembagian tugas.

6. Manajemen Lingkungan (Hubungan Sekolah dengan Masyarakat)

Sekolah sebagai suatu system social merupakan bagian integral dari system sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Maju mundurnya sumber daya manusia (SDM) pada suatu daerah, tidak hanya bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan sekolah, namun sangat bergantung kepada tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di suatu daerah, akan semakin maju pula sumber daya manusia pada daerah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di suatu daerah, akan semakin mundur pula sumber daya manusia pada daerah tersebut.

Oleh karena itu, masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam pembangunan pendidikan di daerah. Masyarakat hendaknya ditumbuhkan “rasa ikut memiliki” sekolah di daerah sekitarnya. Maju-mundurnya sekolah di lingkungannya juga merupakan tanggungjawab bersama masyarakat setempat. Sehingga bukan hanya Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang memikirkan maju mundurnya sekolah, tetapi masyarakat setempat terlibat pula memikirkannya.

Untuk menarik simpati masyarakat agar mereka bersedia berpartisipasi memajukan sekolah, perlu dilakukan berbagai hal, antara lain dengan cara memberitahu masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan.

SUMBER BACAAN

- Creech, Bill. (1996) Lima pilar manajemen mutu terpadu (TQM). Jakarta: Binarupa Aksara.
- Depdiknas. 2000. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Umum
- Portz, John.1996. "Problem Definitions and Policy Agendas: Shaping the Educational Agenda in Boston". *Journal of Policy Studies*, Vol.24. No.3, pp. 371-386
- Sapari, A. 20 April 2001. "Dewan Sekolah: Sudah Siapkah?". Kompas hlm.9
- Setyodarmodjo. 2000. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Slamet, P.H.(2000). *Manajemen Berbasis Sekolah*.
http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/27/manajemen_berbasis_sekolah.htm
- Strauss, A. dan Corbin, J 1997. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik dan Teori Gruonded*. Terjemahan oleh H.M.Djunaidi Ghony. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Suryosubroto,Drs.B.Manajemen Pendidikan Di Sekolah ,Rineka Cipta,Jakarta,2004.
- Sutedjo, 6 Juli 2001. "Daerah Tak Peduli Dewan Sekolah?". *Kompas*, hlm 9
- Suyanto, 16 Februari 2001. "Guru yang Profesional dan Efektif. *Kompas*, hlm9
- Suyanto, 23 Maret 2001. "Kepemimpinan Kepala Sekolah". *Kompas*, hlm 9.
- Wilkinson, Adrian, et.al. (1998) *Managing with total quality management : Theory and practice*. London : Macmillan Press Ltd.

LAMPIRAN 3

LEMBAR KESEPAKATAN KELAS

(DRAFT)

Kami anggota kelas bersepakat bahwa selama kami berada di dalam kelas kami akan menepati janji kami:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kesepakatan ini kami buat dengan sepenuh hati. Jika kami melanggarnya maka kami akan menerima segala bentuk hukuman sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.

<p>NAMA DAN TTD ANGGOTA KELAS</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--

Lampiran 4. PENILAIAN TEMAN SEJAWAT

**PENILAIAN ASPEK SIKAP DAN PERILAKU
UNSUR DISIPLIN ANGGOTA KELAS**

KEGIATAN : Belajar di Kelas/Diskusi/Keg. harian di dalam kls*)
Hari/Tanggal :

No.	Nama Siswa	Indikator				Jumlah Skor	Nilai
		Kehadiran	Ketepatan hadir di kelas	Etika dan sopan santun	Kerapihan berpakaian		

.....
Penilai,
.....

Catatan *) Coret yang tidak perlu

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Korupsi ?



- *Coorruptio* (latin) artinya suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Pengertian Korupsi :



- Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999).
- Abuse of Power atau Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

Motivasi Korupsi

- Korupsi karena kebutuhan
- Korupsi karena ada peluang
- Korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri
- Korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah
- Korupsi karena ingin menguasai suatu negara



Akibat korupsi

- Kerusakan alam berakibat bencana
- Terhambatnya suplai komoditas perdagangan
- Kecelakaan Transportasi
- Harga komoditas tinggi
- Penyebaran narkoba
- Pendidikan dan Kesehatan masyarakat terganggu

Upaya Pencegahan

- Tidak memberi jabatan kepada orang yang potensial menjadi koruptor
- Menjaga dan mengawasi aset negara
- Mengawasi proses perizinan
- Penanganan potensi masalah penyebab korupsi dengan memperbaiki:
 - Sistem ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan
 - Moral/mental pejabat atau masyarakat sendiri yang tidak baik
 - Penghasilan dari pejabat yang kecil dibandingkan kebutuhannya
 - Pelaksanaan pengawasan yang tidak efektif
 - Budaya taat hukum yang rendah

Strategi Jangka Panjang Pemberantasan TIPIKOR

Strategi Jangka Panjang adalah strategi yang diharapkan mampu merubah budaya/pola pandang dan persepsi masyarakat terhadap korupsi

- Membangun dan mendidik masyarakat pada berbagai tingkat dan jenjang kehidupan untuk mampu menangkal korupsi yang terjadi di lingkungannya.
- Membangun suatu tata pemerintahan yang baik sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional.
- Membangun nilai etika dan budaya anti korupsi.

Ciri Sistem Pendidikan Bebas Korupsi

- Kesetaraan terhadap kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu
 - Tercapainya keadilan dalam distribusi sarana pendidikan terhadap seluruh sekolah (285.000 sekolah)
 - Transparansi kriteria penerimaan siswa baru
 - Sistem manajemen yang profesional dan independent untuk akreditasi guru
 - Keadilan pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi
 - Tersedianya pengkodean guru yang mengikat etika dan moral bagi seluruh penyelenggara pendidikan disertai ketersediaan program peningkatan kapasitas untuk guru
- (Stephen Heyneman, 2002)

Ilustrasi Pendidikan Kejujuran di Sekolah Sukma Bangsa

Penerapan pada siswa :

- Tidak mencuri / menyontek
- Tidak melakukan kekerasan fisik maupun verbal
- Tidak merokok di lingkungan sekolah

Penerapan pada Guru :

- Tidak bolos mengajar
- Wajib membaca buku berkaitan perkembangan IPTEK
- Tidak melabel siswa
- Tidak menghukum siswa tanpa pelanggaran yang jelas

Ahmed Basdowi, Direktur Pendidikan Yayasan Sukma Jakarta, dalam kurikulum anti korupsi, Media Indonesia 16 Maret 2009